

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi merupakan jenis inovasi yang dihasilkan oleh manusia yang di maksudkan agar dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia yang awalnya bersifat kompleks menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. Sekarang ini teknologi sudah menjadi partner penting dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam bidang pemerintahan (*E-Government*). *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintahan, seperti penggunaan intranet dan internet, untuk menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta aktivitas lainnya. Konsep ini mencakup proses transaksi antara pemerintah dan publik yang dilakukan melalui sistem otomatisasi dan jaringan internet. Secara esensial, *E-Government* bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan berbagai pihak melalui penerapan teknologi informasi. Penerapan ini kemudian melahirkan bentuk interaksi baru, yaitu G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*) (Wawan Wardiana, 2002).

Transformasi digital memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya inovasi serta peningkatan efisiensi bagi masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi serta data secara lebih cepat dan akurat (Agustina et al., 2019). Penerapan teknologi digital tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, serta kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, transformasi digital menjadi fondasi utama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan publik. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang secara konsisten dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai respons atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menegaskan bahwa birokrasi modern dituntut untuk melakukan transformasi

menuju organisasi yang adaptif, agile, dan fluid guna menghadapi dinamika era digital serta tantangan Revolusi Industri 4.0 (Anonim, 2021). Melalui implementasi transformasi digital dalam birokrasi, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses kerja, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja aparatur negara. Selain itu, transformasi digital juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pada tingkat pemerintahan daerah, penerapan penyederhanaan proses birokrasi yang disertai dengan digitalisasi sistem administrasi merupakan strategi krusial dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas tata kelola publik. Berbagai studi sebelumnya menyatakan bahwa pelaksanaan transformasi birokrasi di level lokal mampu mempercepat penyampaian layanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah (Ristala Harky, 2022). Keberhasilan implementasi pemerintahan digital di daerah didukung oleh sejumlah faktor, antara lain komitmen pimpinan daerah, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kesiapan sumber daya manusia aparatur, serta dukungan regulasi yang mendorong integrasi dan interoperabilitas sistem (Zein & Septiani, 2024). Namun demikian, proses transformasi ini juga menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, resistensi terhadap perubahan organisasi, serta ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat memengaruhi optimalisasi penerapan pemerintahan digital apabila tidak dikelola secara strategis dan berkelanjutan (Dalimunthe et al., 2025).

Pemerintah Kabupaten Sleman secara berkelanjutan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan daerah yang berorientasi pada digitalisasi melalui pengembangan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendorong penerapan *E-Government* sebagai instrumen peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas

pelayanan publik. Salah satu inisiatif strategis yang menjadi landasan transformasi digital di Kabupaten Sleman adalah program “*Sleman Smart Regency*” yang berpedoman pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Masterplan Smart City. Program tersebut mengusung visi terwujudnya masyarakat Sleman yang mandiri, berbudaya, serta terintegrasi dengan sistem *E-Government* menuju Kabupaten Sleman sebagai *Smart Regency*. Dalam perkembangannya, transformasi pemerintahan digital di Kabupaten Sleman ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan, integrasi layanan lintas perangkat daerah, serta penerapan sistem digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi ini mencerminkan pergeseran tata kelola pemerintahan dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Transformasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan birokrasi yang adaptif, pelayanan publik yang terintegrasi, serta mendukung konsep *Smart Living* melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan *Smart Economy* dalam rangka penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan (Anonim, 2017). Kapanewon Depok sebagai salah satu wilayah berkembang di Kabupaten Sleman memiliki dinamika pembangunan yang cukup tinggi, memiliki tingkat mobilitas masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Kapanewon Depok merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sleman yang mengimplementasikan pengembangan *E-Government* melalui penggunaan Aplikasi Si Urat Nadi dalam pengelolaan administrasi naskah dinas (Mono & Samaloisa, 2022). Penerapan aplikasi ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi administrasi pemerintahan untuk mendukung terciptanya sistem kerja yang lebih modern, efektif, dan efisien. Melalui aplikasi tersebut, berbagai proses administrasi seperti penyusunan, pemeriksaan, pengesahan, pendistribusian, hingga penyimpanan naskah dinas dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam satu sistem. Pemanfaatan Aplikasi Si Urat Nadi di Kapanewon Depok bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan mempercepat proses kerja dan mempermudah pengelolaan dokumen. Sebelum sistem digital diterapkan, pengelolaan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan

waktu yang relatif lama serta berisiko menimbulkan keterlambatan dan kesalahan administrasi. Setelah penggunaan aplikasi diterapkan, proses administrasi menjadi lebih tertata, mudah dipantau, dan lebih praktis dalam pelaksanaannya. Selain itu, aplikasi juga membantu pegawai dalam melakukan pencarian dokumen secara lebih cepat karena seluruh data tersimpan di dalam sistem digital.

Keberhasilan penerapan Aplikasi Si Urat Nadi di Kapanewon Depok dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Salah satunya adalah adanya dukungan kebijakan dan arahan dari pimpinan sebagai dasar pelaksanaan sistem administrasi digital. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting, karena pegawai harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi agar proses administrasi dapat berjalan optimal. Dukungan sarana dan prasarana seperti komputer, perangkat pendukung, dan jaringan internet yang memadai turut menentukan kelancaran penggunaan aplikasi dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Penerapan aplikasi ini juga memberikan berbagai manfaat dalam tata kelola administrasi naskah dinas, seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, menghemat waktu dalam proses administrasi, serta menciptakan pengelolaan dokumen yang lebih tertib dan terorganisasi. Dengan demikian, penggunaan Aplikasi Si Urat Nadi di Kapanewon Depok tidak hanya menjadi bentuk inovasi digital dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola administrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Penyusunan naskah dinas dalam praktiknya masih kerap menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan waktu, ketidaksesuaian format, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi berbasis digital yang mampu mendukung tertib administrasi pemerintahan. Naskah dinas adalah bentuk komunikasi resmi secara tertulis yang berisi informasi kedinasan dan disusun serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkungan instansi pemerintahan (Efendi, 2019). Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah proses pengiriman surat pada instansi terkait, termasuk surat

perintah dan surat tugas. Adanya sistem informasi naskah dinas ini membantu pegawai dalam melakukan pengiriman surat antarpegawai sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah dan efisien (Nugraha et al., 2020). Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan melalui pengaturan tata cara pembuatan, pengelolaan, pengamanan, dan penggunaan naskah dinas yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, regulasi ini juga memuat ketentuan mengenai format naskah dinas, sistem penomoran, penggunaan kop surat, penandatanganan, klasifikasi keamanan dokumen, hingga tata cara pengarsipan dokumen pemerintahan. Dalam mendukung transformasi digital, peraturan tersebut turut mengatur pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan. Penggunaan TNDE memungkinkan proses pengelolaan surat menyurat dilakukan secara elektronik mulai dari penerimaan, disposisi, penandatanganan digital, pengiriman, hingga penyimpanan dokumen secara terintegrasi. Dengan adanya regulasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan pengelolaan administrasi naskah dinas secara lebih modern, sistematis, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kehadiran aplikasi Si Urat Nadi menjadi solusi strategis dalam menjawab permasalahan tersebut dengan menyediakan berbagai fitur pendukung, seperti template naskah dinas, panduan penyusunan, serta contoh dokumen resmi yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi Si Urat Nadi tidak hanya memberikan kemudahan bagi aparatur dalam menyusun naskah dinas secara lebih cepat, tepat, dan seragam, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi administrasi pemerintahan. Selain itu, implementasi aplikasi ini turut memperkuat peran kapanewon sebagai unsur pembina kalurahan, khususnya

dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, terstandar, dan akuntabel. Dengan demikian, Si Urat Nadi berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat wilayah.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teori, yaitu teori *e-government*, tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transformasi digital, serta administrasi publik, yang digunakan untuk menganalisis pengembangan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan administrasi naskah dinas. Teori *E-Government* berfungsi untuk menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan efisiensi, efektivitas, dan mutu administrasi pemerintahan. Sementara itu, konsep *Good Governance* menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban administrasi. Teori transformasi digital digunakan untuk memahami perubahan sistem kerja birokrasi dari pola konvensional menuju digital, sedangkan teori administrasi publik berperan dalam mengkaji prosedur, standar, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan dan pengelolaan naskah dinas (Indrajit, 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang berfokus pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai proses pengembangan *E-Government* dalam tata kelola administrasi naskah dinas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparatur yang terlibat secara langsung, pengamatan terhadap proses administrasi, serta penelaahan dokumen berupa peraturan, pedoman, dan sistem pendukung yang digunakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengolahan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan, dengan memastikan validitas data melalui teknik triangulasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan permasalahan utama penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Tata Kelola Administrasi Naskah .
2. Bagaimana dampak penerapan aplikasi si urat nadi sebagai inovasi Tata Kelola Administrasi Naskah di Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Tata Kelola Administrasi Naskah .
2. Mengetahui dampak penerapan aplikasi si urat nadi sebagai inovasi Tata Kelola Administrasi Naskah di Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan pernyataan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang administrasi, *E-Government*, dan manajemen kearsipan. Melalui hal tersebut bertujuan memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai *E-Government*, memberikan pemahaman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem administrasi naskah elektronik, dan menguatkan sistem integrasi antara teknologi informasi dengan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.
2. Manfaat praktis, memberikan manfaat bagi Kabupaten Sleman agar pengembangan Si Urat Nadi menjadi lebih efektif dan User-friendly dalam melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas, bisa menjadi referensi sistem administrasi naskah dinas dalam lingkungan daerah, membantu

memberikan pemahaman kepada para pegawai agar dapat lebih memahami terkait penggunaan *E-Government* dalam melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas yang cepat, transparan, dan akuntabel.

3. Manfaat sosial dan kebijakan publik, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong terciptanya *Good Governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan BAB merupakan salah satu komponen yang penting dalam penulisan skripsi ini, karena akan memberikan kejelasan sehingga data yang di sampaikan dapat dipahami oleh pembaca. Berikut deskripsi sistematika penulisan ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini berisikan pembahasan teori, konsep, dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan penguatan argumen penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB ini berisikan langkah ilmiah untuk memperoleh, mengolah, serta menganalisis data agar permasalahan dari penelitian ini dapat dijawab dan tujuan penelitian dapat tercapai sehingga penelitian ini di pertanggung jawabkan keabsahannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisikan pemaparan dari data yang dilakukan yang meliputi pemaparan data, serta temuan yang berdasarkan pada indikator dan teori utama.

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran sebagai rekomendasi dari penelitian ini

